



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

KAJIAN DAN EVALUASI UU KESEJAHTERAAN SOSIAL

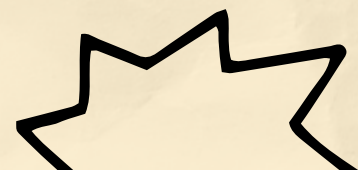
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG





LATAR BELAKANG

1. Pasal 28H dan Pasal 34 UUD NRI 1945
2. Permasalahan kesejahteraan sosial dalam hal substansi dan implementasi UU Kesos terkait persoalan kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterpencilan, penyalahgunaan napza, korban tindak kekerasan, dan korban bencana alam, serta bencana sosial
3. Long list Prolegnas tahun 2020-2024 dengan nomor urut 238
4. Fungsi pengawasan DPR RI : Pasal 69 ayat (1) jo. Pasal 70 ayat (3) UU MD3; Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (3) Tatib DPR RI

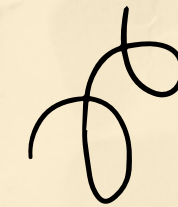




PERMASALAHAN

1

Apakah materi muatan UU Kesos masih memadai untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial?

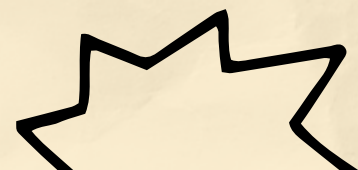


2

Sejauh mana efektivitas UU Kesos dalam memenuhi kebutuhan dasar warga negara?

METODE PEMANTAUAN

Yuridis Normatif & Yuridis Empiris



STAKEHOLDERS (PUSAT)



FAKULTAS
HUKUM



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

1. DIT. REHABILITASI SOSIAL ANAK
2. DIT. REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS
3. DIT. REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG
4. DIT. PENGELOLAAN SUMBER DANA BANTUAN SOSIAL
5. DIT. JAMINAN SOSIAL KELUARGA
6. BIRO HUKUM



DIT. PENANGANGGULANGAN KEMISKINAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

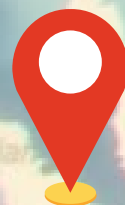
**Kementerian PPN/
Bappenas**



DAERAH PEMANTAUAN



**PROVINSI
SUMATERA BARAT**

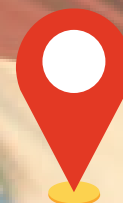


KOTA PARIAMAN



**PROVINSI
JAWA TENGAH**

KOTA SURAKARTA



**PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**
KOTA BALIKPAPAN



DAERAH PEMANTAUAN



STAKEHOLDERS (DAERAH)



1. LKKS PROVINSI JAWA TENGAH
2. BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH
3. DINSOS PROVINSI JAWA TENGAH
4. FH UNDIP



1. LKKS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2. BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
3. DINSOS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
4. FISIP UNIVERSITAS MULAWARMAN



1. DINSOS KOTA SURAKARTA



1. DINSOS KOTA BALIKPAPAN



1. LKKS PROVINSI SUMATERA BARAT
2. BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT
3. DINSOS PROVINSI SUMATERA BARAT
4. FH UNIVERSITAS ANDALAS

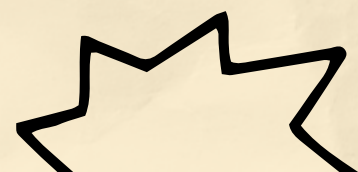
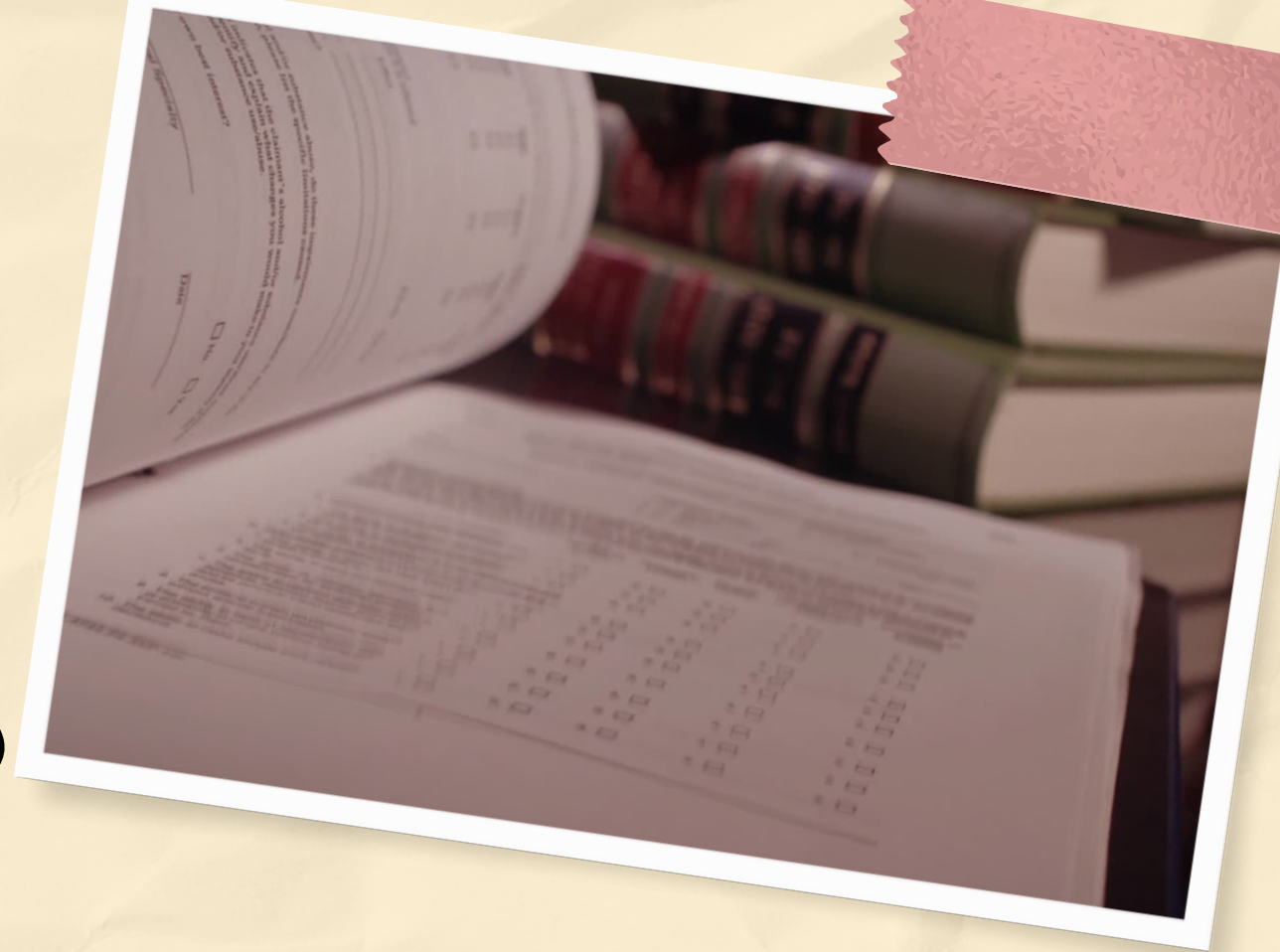


1. DINSOS KOTA PARIAMAN



ASPEK SUBSTANSI

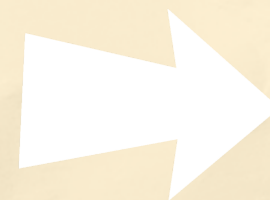
HUKUM





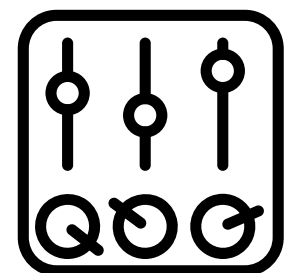
Belum diakomodirnya Asas Kesetaraan dan Asas Non Diskriminasi dalam Ps 2 UU Kesos

Tidak diakomodirnya kedua asas tersebut berpotensi menimbulkan inkonsistensi dengan pengaturan Ps 5 ayat (2) huruf c UU Kesejahteraan Sosial dan Pasal 2 UU Penyandang Disabilitas.



Rekomendasi

penambahan asas non-diskriminasi dan asas kesetaraan dalam Pasal 2 UU Kesejahteraan Sosial



Belum terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai Parameter Kriteria Masalah Sosial

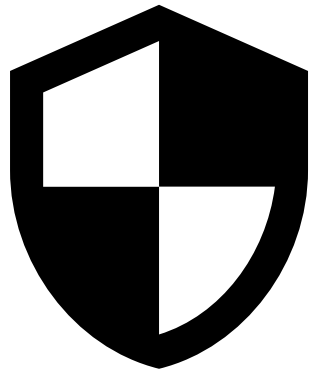
Pengaturan kriteria masalah sosial dalam Ps 5 ayat (2) UU Kesejahteraan Sosial memerlukan penjelasan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal.



Rekomendasi

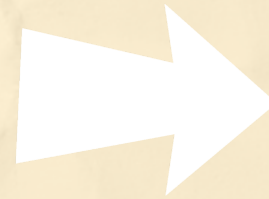
Terdapat 2 pilihan kebijakan:

1. menambahkan klaster baru terkait masalah sosial lainnya dan penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria masalah sosial atau
2. menambahkan norma dalam UU Kesejahteraan Sosial yang secara eksplisit mendelegasikan peraturan pelaksanaan yang mengatur penjelasan mengenai parameter kriteria masalah sosial.



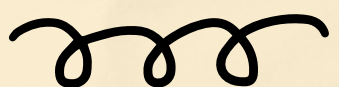
Potensi Disharmoni dgn UU SJSN

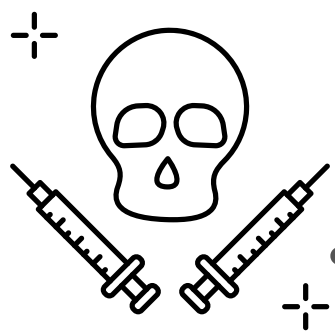
- Antara Ps 1 angka 9, Ps 1 angka 11, dan Ps 6 UU Kesejahteraan Sosial sepanjang frasa “jaminan sosial” dan “perlindungan sosial” dengan Pasal 1 angka 1 UU SJSN.
- Ps 9 ayat (2), Ps 10, dan Penjelasan Ps 9 ayat (2) UU Kesejahteraan Sosial sepanjang frasa “asuransi kesejahteraan sosial” dengan Ps 1 angka 3 UU SJSN.



Rekomendasi

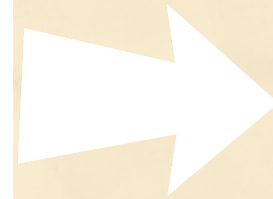
Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 11, dan Pasal 6 UU Kesejahteraan Sosial sepanjang frasa “jaminan sosial” dan frasa “perlindungan sosial” dengan Pasal 1 angka 1 UU SJSN serta Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, dan Penjelasan Pasal 9 ayat (2) UU Kesejahteraan Sosial sepanjang frasa “asuransi kesejahteraan sosial” dengan Pasal 1 angka 3 UU SJSN.





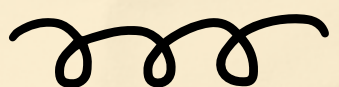
Potensi Disharmoni dgn UU Narkotika

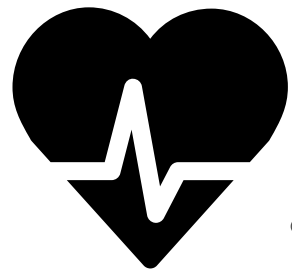
- INKONSISTENSI PENGATURAN: Pasal 54 dan Ps 127 ayat (3) UU Narkotika menyebutkan bahwa Pecandu dan Penyalah Guna Narkotika wajib rehabilitasi sosial. Permasalahan terkait NAPZA tidak diakomodir dalam Ps 5 ayat (2) UU Kesejahteraan Sosial yang mengatur tentang masalah sosial.



Rekomendasi

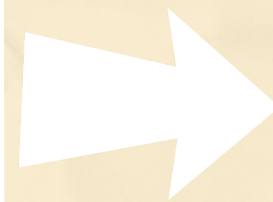
.....





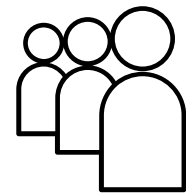
Potensi Disharmoni dgn UU Kesehatan

- Antara Ps 1 angka 1 UU Kesejahteraan Sosial dengan definisi sehat Pasal 1 angka 1 UU Kesehatan.
- Belum memasukkan unsur “kesehatan (fisik)” dalam definisi kesejahteraan sosial.



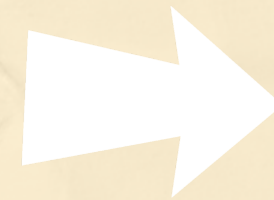
Rekomendasi

perubahan Pasal 1 angka 1 UU Kesejahteraan Sosial dengan menambahkan “kesehatan (fisik)” dalam definisi kesejahteraan sosial;



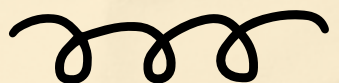
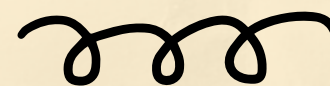
Potensi Disharmoni dgn UU Pekerja Sosial

- Ruang lingkup kesejahteraan sosial yang diatur dalam Ps 6 UU Kesejahteraan Sosial berbeda dengan pengaturan ruang lingkup praktik pekerjaan sosial sebagai bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diatur dalam Ps 4 UU Pekerja Sosial.
- Pengaturan bentuk-bentuk rehabilitasi sosial yang diatur dalam Ps 7 ayat (3) UU Kesos dengan Ps 9, Ps 10 ayat (2) dan Ps 11 ayat (2) dan ayat (3) UU Pekerja Sosial.



Rekomendasi

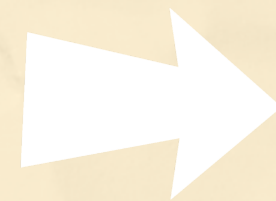
Pasal 6 UU Kesejahteraan Sosial dengan ruang lingkup penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diatur dalam Pasal 4 UU Pekerja Sosial. Selain itu, terkait bentuk-bentuk rehabilitasi sosial yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) UU Kesejahteraan Sosial juga perlu dilakukan harmonisasi dengan menyesuaikan bentuk-bentuk rehabilitasi sosial yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) UU Pekerja Sosial.





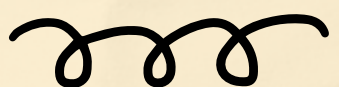
Potensi Disharmoni dgn UU Penanganan Fakir Miskin

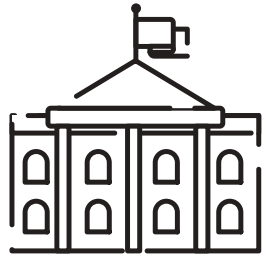
- Antara UU Kesejahteraan Sosial UU Penanganan Fakir Miskin mengatur bentuk-bentuk penanganan atau penanggulangan kemiskinan yang memiliki kesamaan, namun dengan istilah yang berbeda.
- Pengembangan potensi diri, bantuan pangan dan sandang, serta bantuan hukum yang diatur dalam Ps 7 ayat (1) UU Penanganan Fakir Miskin, bukan merupakan bentuk penanggulangan kemiskinan sebagaimana yang diatur dalam Ps 21 UU Kesejahteraan Sosial.



Rekomendasi

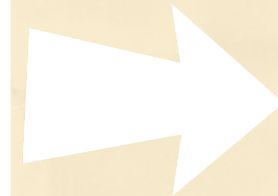
Harmonisasi Pasal 21 UU Kesejahteraan Sosial dengan Pasal 7 ayat (1) UU Penanganan Fakir Miskin.





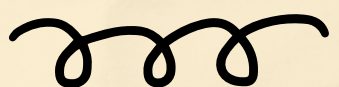
Potensi Disharmoni dgn UU Pemda

- Perbedaan Pengaturan Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial: **Ps 6 UU Kesejahteraan Sosial belum selaras dengan sub bidang urusan pemerintahan di bidang sosial dalam Lampiran F UU Pemda.** Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, taman makam pahlawan, sertifikat dan akreditasi bukan bagian dari ruang lingkup atau sub bidang dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Ps 6 UU Kesejahteraan Sosial.
- Perbedaan Pengaturan Tanggung Jawab dan Wewenang dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial: **Penormaan tanggung jawab dan wewenang dalam UU Kesos masih belum selaras dengan UU Pemda.**



Rekomendasi

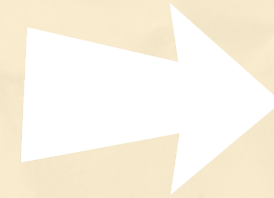
Pasal 6 UU Kesejahteraan Sosial berkaitan dengan ruang lingkup penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan Lampiran F UU Pemda sebagai penjabaran dari Pasal 12 UU Pemda





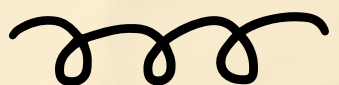
Potensi Disharmoni dgn UU Penyandang Disabilitas

- UU Kesejahteraan Sosial masih menggunakan frasa “Kecacatan/Cacat”.
- Pemberian bentuk jaminan sosial yang salah satunya diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam Ps 9 ayat (2) UU Kesejahteraan Sosial berbeda dengan bentuk jaminan sosial terhadap Penyandang Disabilitas.



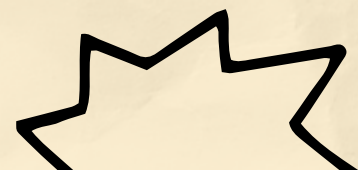
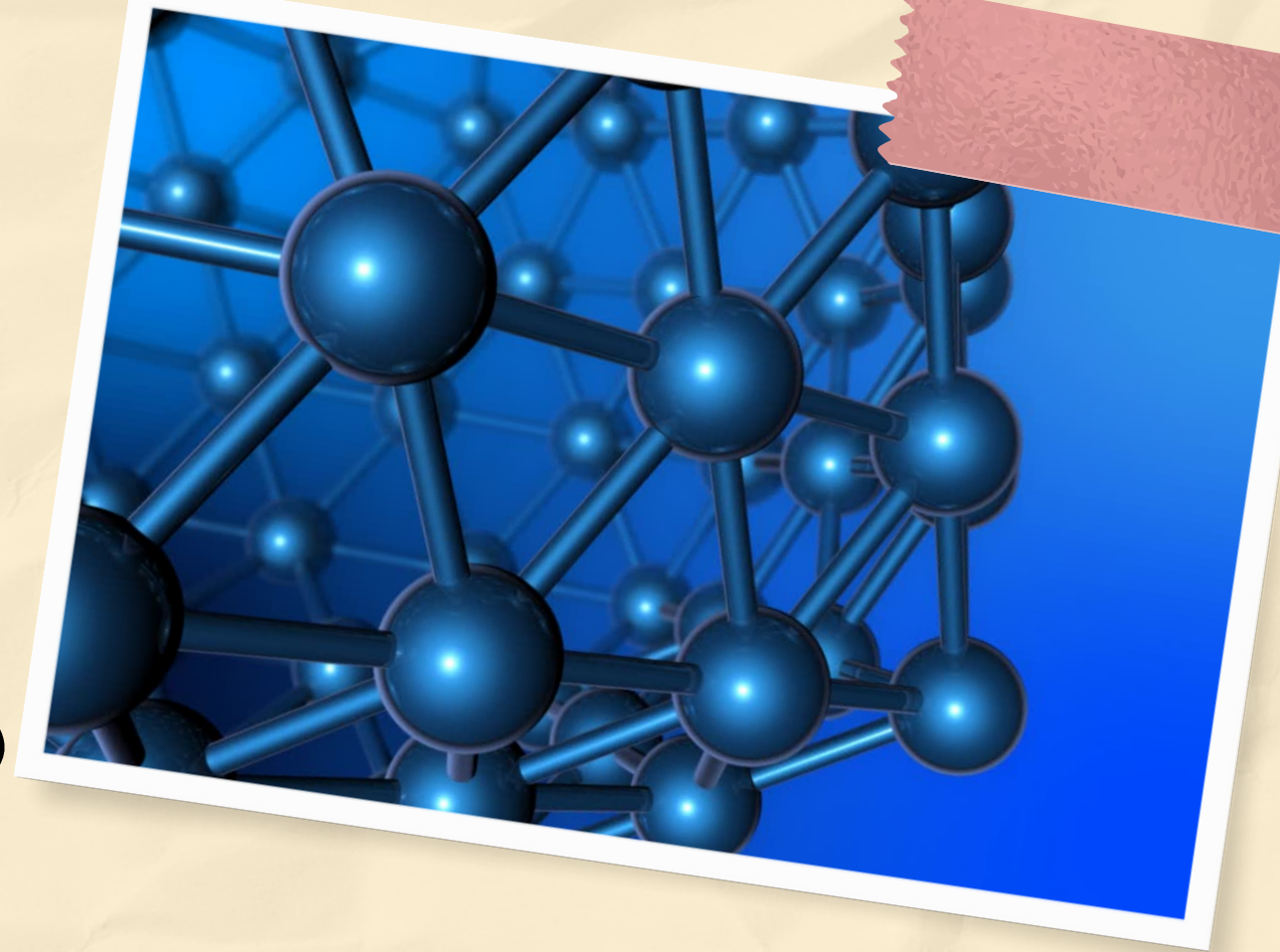
Rekomendasi

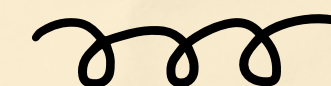
1. perubahan frasa “Kecacatan/Cacat” yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, Pasal 9 ayat (1) huruf a, dan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Kesejahteraan Sosial dengan “Penyandang Disabilitas”.
2. Penyesuaian terkait bentuk pemberian jaminan sosial terhadap Penyandang Disabilitas yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU Kesejahteraan Sosial dengan mengacu terhadap ketentuan Pasal 93 ayat (2) dan ayat (3) UU Penyandang Disabilitas.

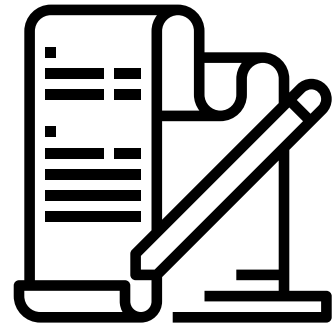




ASPEK STRUKTUR HUKUM







Pelaksanaan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Program ataupun kebijakan yang terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menjadi kewenangan pemerintah pusat selama ini diselenggarakan secara parsial tanpa adanya kolaborasi antar instansi pemerintah.

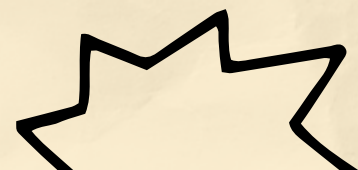


Rekomendasi

Peningkatan sinergitas antar kementerian/lembaga dalam menangani kesejahteraan sosial sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien.

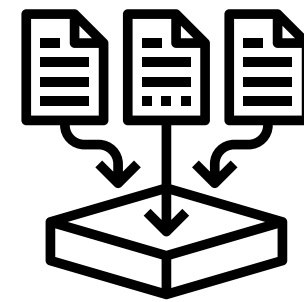


ASPEK SARANA DAN PRASARANA



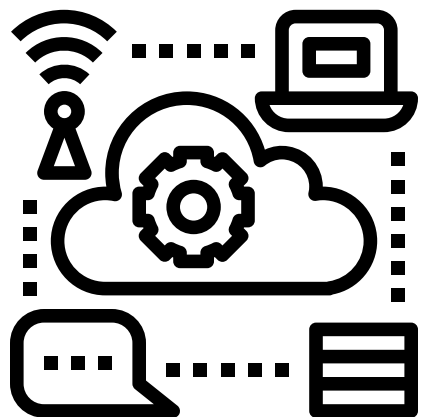


**Keterbatasan Sumber Daya
Manusia dalam
Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial**

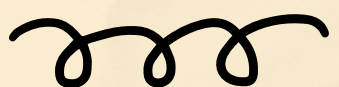


**Permasalahan Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial**

DTKS masih belum terintegrasi secara nasional. Masih ada data BPS terkait kesejahteraan sosial yang tidak sinkron dengan DTKS.

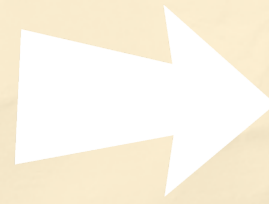


**Keterbatasan Sarana dan
Prasarana dalam
Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial**



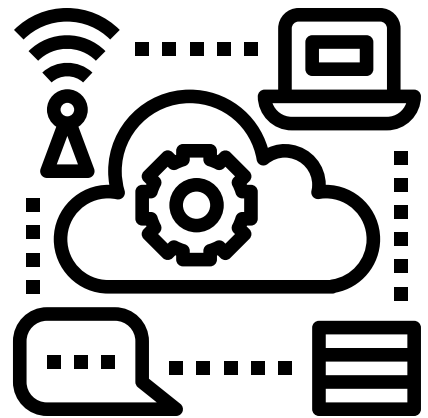


Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial



Rekomendasi

peningkatan kualitas dan kuantitas SDM khususnya Pekerja Sosial melalui program pelatihan dan proses rekrutmen yang sesuai dengan standar.

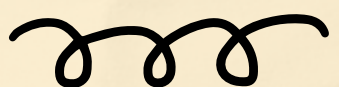


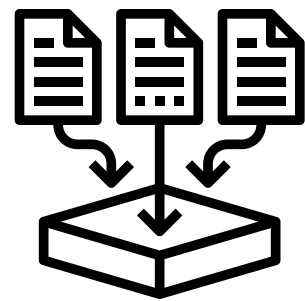
Keterbatasan Sarana dan Prasarana dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial



Rekomendasi

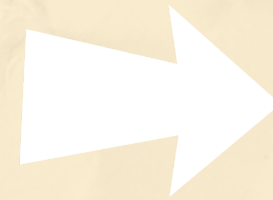
peningkatan komitmen dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemenuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial.





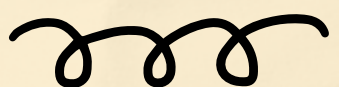
Permasalahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

DTKS masih belum terintegrasi secara nasional. Masih ada data BPS terkait kesejahteraan sosial yang tidak sinkron dengan DTKS.



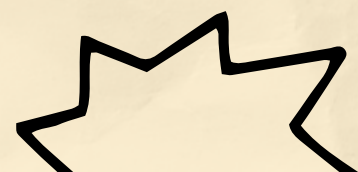
Rekomendasi

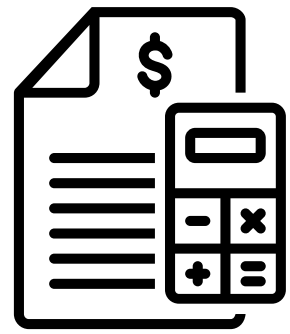
1. simplifikasi dan integrasi pendataan kesejahteraan sosial,
2. sosialisasi penyusunan program kerja pemerintah daerah oleh pemerintah pusat, dan
3. mempermudah aksesibilitas DTKS.





ASPEK PENDANAAN





**Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial
masih bergantung pada
APBN**



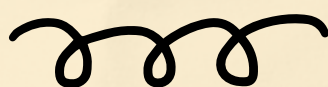
Rekomendasi

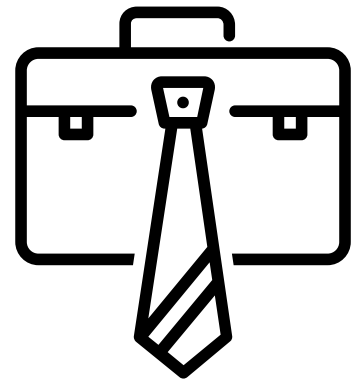
Perlu peningkatan komitmen dalam penyusunan kegiatan dan anggaran pada masing-masing instansi Pusat dan Daerah agar mengalokasikan dana yang memadai untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.



Permasalahan Alokasi APBD

Perbedaan kemampuan keuangan setiap daerah, prioritas pembangunan, serta terdapat visi misi setiap kepala daerah yang mempengaruhi alokasi APBD masing-masing daerah



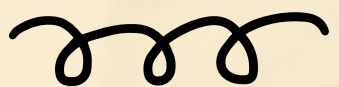


Sumber pendanaan berasal dari CSR masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya menyentuh masalah sosial tertentu.



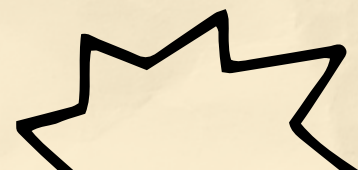
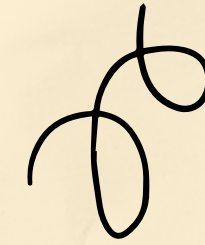
Rekomendasi

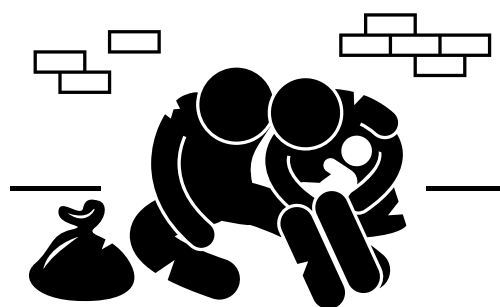
penguatan sumber pendanaan lain seperti sumbangan masyarakat; dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*CSR*); serta bantuan asingguna membantu memenuhi kebutuhan pendanaan masalah kesejahteraan sosial.





ASPEK BUDAYA HUKUM



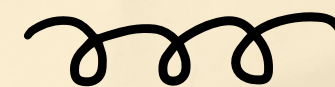


**Kemiskinan sbg
komoditi untuk
mendapatkan Bansos**



Rekomendasi

optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dapat dilakukan dengan pemerintah guna mendorong kemandirian masyarakat, agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.





Pelibatan masyarakat, Akses informasi, sosialisasi

- keterbatasan masyarakat dalam mengakses informasi pelaksanaan kesejahteraan sosial;
- belum dilibatkannya LKKS sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- ketidakjelasan mekanisme pengawasan yang menyulitkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan; dan
- kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kanal-kanal yang ada di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

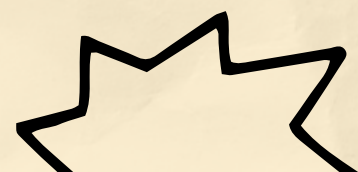
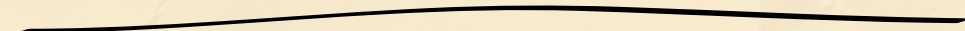


Rekomendasi

sosialisasi yang lebih masif dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada masyarakat terkait perannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta perlunya komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melibatkan LKKS sebagai mitranya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial



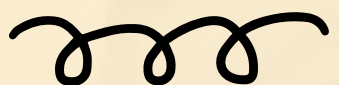
KESIMPULAN





Berdasarkan kelima aspek tersebut, masih terdapat permasalahan materi muatan UU Kesos dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun di daerah.

UU Kesejahteraan Sosial belum cukup memadai dan efektif digunakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan kesejahteraan sosial saat ini dan yang akan datang.





WE'RE OPEN TO QUESTIONS.

